



## Untuk Raih WTP Benahi Pengendalian Internal

**SUNGAI RAYA** - Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan laporan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih terbentur pada sisi kepatuhan dan pengendalian internal.

"Untuk mengatasi persoalan tersebut, kedepan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga Kubu Raya bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Hermanus saat menghadiri rapat paripurna jawaban Bupati Kubu Raya terhadap Pandangan Umum Fraks-Fraksi DPRD mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013 dan perubahan perda Nomor 14 tahun 2009 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya, Rabu (23/7) di Gedung DPRD Kubu Raya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan, kata dia akan diarahkan pada upaya menggali berbagai potensi daerah dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap sumber dana perimbangan.

"Langkah ini ditempuh dengan tetap berpegang pada kepentingan masyarakat agar masyarakat tidak terbebani, namun justru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Soal upaya peningkatan pendapatan daerah menurut Hermanus juga telah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak dan retribusi daerah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak, pembinaan internal untuk meningkatkan kompetensi teknis petugas lapangan dan melakukan pemutakhiran data wajib pajak daerah. "Upaya ini

akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hermanus juga memaparkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 79,28 persen atau Rp116,49 miliar dari target sebesar Rp146,84 miliar. Sangat tergantung dengan target realisasi penyaluran atau transfer yang dilakukan oleh provinsi dan pusat yang dituangkan dalam surat keputusan.

Disisi belanja daerah kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan efektif, dan memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan sisi strategis daerah yakni peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Realisasi belanja daerah tahun 2013 terealisasi sebesar 93,97 persen dari anggaran sebesar Rp1,01 triliun, pada belanja daerah tersebut terdapat belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp51,49 miliar dari anggaran sebesar Rp42,93 miliar," terangnya.

Dalam rangka ketegasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hermanus mengaku pihaknya akan melakukan pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha, penegakan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, memberikan sanksi kepala pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ash)